Dana Parpol Belum Transparan

PONTIANAK, SP - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan dana Partai Politik (Parpol) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), semula Rp1,3 miliar menjadi Rp9,3 triliun, di satu sisi menjadi angin segar bagi Parpol.

Tapi di sisi lain, pemberian dana dalam jumlah besar dianggap belum optimal, selama Parpol belum bersikap transparan menggunakan dana ban-

• Baca Halaman 7

SUARA PEMRED LIPUTAN KHUSUS SUARA PEMRED

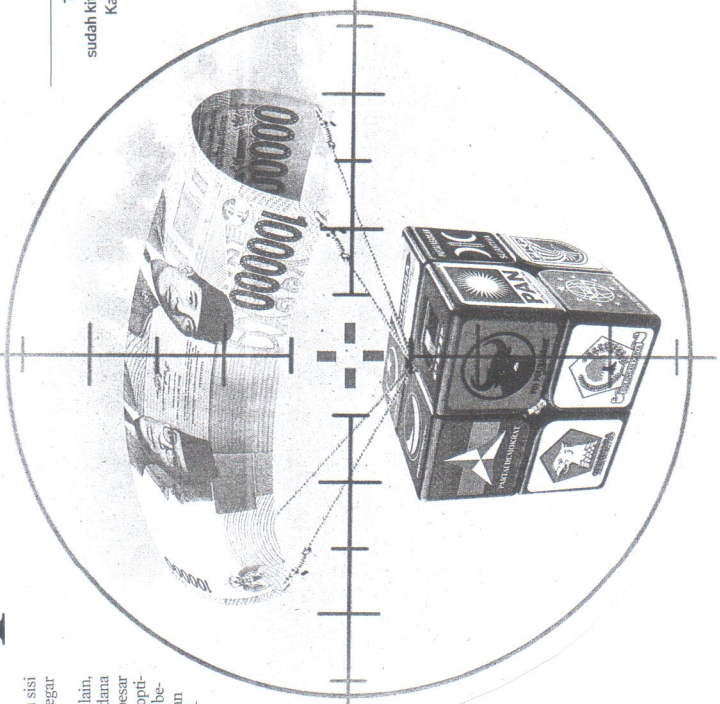

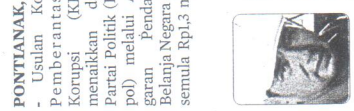

Syarif Usmulyadi
Pengamat Politik

Saya pikir itu sesuatu yang kelewatan. Artinya tidak ada empati melihat keadaan Indonesia seperti sekarang. Bisa saja dana itu diberikan, tapi jangan sekarang.

Satarudin
Ketua DPRD Pontianak

Tidak transparannya dari mana? Semua kegiatan Parpol sudah kita laporkan. Dari seminar, sosialisasi, konsolidasi partai. Kan itu, 60 persen pendidikan politik, sudah kita laporkan.

DANA PARPOL DI DPRD KALBAR

Partai Nasdem	*5 kursi x Rp 20 juta*	Rp 100 juta
PKB	*2 kursi x Rp 20 juta*	Rp 40 juta
PKS	*2 kursi x Rp 20 juta*	Rp 40 juta
PDIP	*15 kursi x Rp 20 juta*	Rp 300 juta
Partai Golkar	*9 kursi x Rp 20 juta*	Rp 180 juta
Partai Gerindra	*7 kursi x Rp 20 juta*	Rp 140 juta
Partai Demokrat	*9 kursi x Rp 20 juta*	Rp 180 juta
PAN	*6 kursi x Rp 20 juta*	Rp 120 juta
PPP	*4 kursi x Rp 20 juta*	Rp 80 juta
Partai Hanura	*3 kursi x Rp 20 juta*	Rp 60 juta
PKPI	*3 kursi x Rp 20 juta*	Rp 60 juta
TOTAL		Rp 1,3 Miliar

Hal 1 ■ **dana parpol**

tuan diberikan selama ini. Contoh kecil, bantuan dana Parpol di daerah, di mana setiap tahun dibantu Pemerintah Daerah (Pemda) menganggarkan menggunakan APBD, justru banyak Parpol mengabaikan laporan penggunaan dana kepada publik.

Seperti Parpol di Kota Pontianak. Penelusuran *Suara Pemred* ke Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, terdapat sejumlah Parpol abai melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan.

Kepala Kesbangpol Pontianak, Zulkarnain mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, semua Parpol penerima bantuan dari Pemkot, dalam laporannya sering kali ditemukan tidak sesuai.

"Biasanya laporan terlambat dan tidak sesuai dengan peruntukan. Kelebihan pembayaran dan lain sebagainya. Kami dapat laporannya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Zulkarnain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 pasal 34 a, setiap Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan, paling lambat sebulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Tiga bulan kemudian laporan itu diaudit oleh BPK.

Pemerintah Kota Pontianak tahun ini memberikan bantuan dana ke 11 Parpol. Di mana hanya Parpol yang memiliki kursi di DPRD Pontianak saja yang diberi. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah suara. Satu suara yang didapat senilai Rp5.000 sesuai peraturan Kemendagri. Total anggaran yang dikeluarkan Pemkot untuk dana Parpol ini sejumlah Rp1,4 miliar.

Per 1 Januari 2017, Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan keuangan dana Parpol diterapkan. Semua laporan wajib sesuai dan benar, akan ada sanksi bila laporan yang diberikan partai tidak sesuai.

"Jadi tidak bisa lagi setiap Parpol itu untuk tidak menyampaikan laporannya dengan benar, karena akan ada tindaklanjutnya, akan ada rekomendasi yang disampaikan BPK," katanya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berharap tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Parpol. Sebagaimana diketahui, besar dana yang diberikan 60 persen harus digunakan untuk pendidikan politik. Sisanya untuk operasional kesekretariatan.

Belum Sesuai

Pengamat Politik Untan, Syarif Usmulyadi mengatakan, pemberian tambahan alokasi dana ke Parpol dari pemerintah, untuk saat ini rasanya belum pas. Apalagi kondisi perekonomian bangsa sedang tidak bagus. Pemerintah kekurangan dana. Faktanya, banyak anggaran instansi, lembaga dan pemerintah daerah yang dipangkas.

"Saya pikir itu sesuatu yang kelewatan. Artinya tidak ada empati melihat keadaan Indonesia seperti sekarang. Bisa saja dana itu diberikan, tapi jangan sekarang. Tunggu sampai keadaan ekonomi membaik. Saat ini, jauh lebih penting untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Apalagi jika dilihat, kehidupan para anggota Parpol jauh lebih baik bila dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Harusnya para anggota partai yang duduk di kursi legislatif konsen dalam memperjuangkan masyarakat menjadi lebih makmur. Kesehatan dan pendidikannya meningkat. Bukan justru memikirkan diri sendiri.

"Bila perlu, Parpol tak perlu diberi alokasi dana. Sebab berapa pun jumlahnya, akan menyedot anggaran. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih utama, lebih mendesak, yang seharusnya bisa untuk rakyat, tapi justru diberikan pada mereka," katanya.

Ketua DPC PDIP Pontianak, Satarudin berpandangan lain. Selama ini pihaknya telah melaporkan dana yang digunakan oleh partainya ke BPK. Laporannya pun diaudit oleh BPK.

"Artinya tidak transparan dari mana? Semua kegiatan Parpol sudah kita laporkan. Dari seminar, sosialisasi, konsolidasi partai. Kan itu, 60 pers en pendidikan politik, sudah kita laporkan," ujarnya.

Perihal kenaikan alokasi dana untuk Parpol dari pusat, dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. "Itu kita ikut saja, itu urusan pemerintahan pusat, kita kan makmum. Kalau pusat bilang monggo, kita ikut saja," tutupnya.

Ketua DPC PPP Kota Pontianak, Herman Hofi menyebutkan, selama ini partainya sudah sangat terbuka akan pengguna dana. Namun jumlah sangat minim, disesuaikan dengan jumlah kursi di DPRD.

"Partai kami termasuk partai menengah, anggarannya sangat terbatas sekali. Dengan demikian tentu kami tidak bisa terlalu fokus untuk pengkaderan dan aktivitas lain dengan keterbatasan yang ada," katanya.

Selama ini, operasional kegiatan partai juga dibiayai oleh kader partainya sendiri. Kader-kader yang duduk di legislatif diberi kewajiban untuk membantu partai.

Ia pun menyambut baik wacana peningkatan alokasi dana Parpol. Menurutnya, adanya dana itu dapat membuat Parpol fokus dalam pengkaderan dan pembinaan. Apalagi Parpol adalah partai kader. Orang-orang yang dipersiapkan untuk memimpin negara.

Hitung Per Kursi

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menyebutkan, dengan adanya dana partai politik (Parpol) yang dihitung melalui jumlah kursi legislatif, itu cukup baik. Sebab dapat mencegah upaya praktik korupsi oleh oknum anggota dewan.

"Baik, untuk mengurangi perbuatan melawan hukum dari anggota-anggota DPRD yang mewakili Parpol," kata Suriansyah.

Sementara terkait dengan transparansi dana tersebut, katanya, mekanisme pengawasan sudah diatur sehingga jelas penggunaannya.

"Setiap pengeluaran dipertanggung jawabkan dengan bukti yang sah. Dan itu diaudit oleh BPK," terangnya.

Dilanjutkan, kalaupun memang adanya dana parpol itu dianggap menyalahi, tentu saja bisa ditindak.

"BPK sebagai auditor pemeriksa, memahami dan mengetahui kalau terjadi penyimpangan penggunaan dana. Soal transparansi, itu tidak ada masalah," katanya. **(umr/bls/ ant/loh)**